

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah diuraikan dalam pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal 86 Statuta Roma memiliki implikasi terhadap kewajiban negara anggota karena pasal tersebut secara eksplisit telah memberikan kewajiban bagi negara anggota ICC untuk melaksanakan surat perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin. Segala bentuk penolakan terhadap surat tersebut yang bukan beralasan karena keamanan nasional sebagaimana ketentuan Pasal 72 Statuta Roma tidak dapat diterima, sehingga dalam hal ini penolakan yang disampaikan oleh Afrika Selatan dan Hungaria tidak dapat diterima, dan apabila di kemudian hari negara tersebut ataupun ada negara anggota ICC lainnya yang tidak menangkap Presiden Vladimir Putin ketika berada di wilayahnya maka hal tersebut merupakan bentuk kegagalan sebagaimana yang diatur pada pasal 87 ayat (7) Statuta Roma.
2. Surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC kepada Presiden Rusia Vladimir Putin telah sesuai karena telah memenuhi syarat dikeluarkannya surat berdasarkan Pasal 58 Statuta Roma yang mana dengan dikeluarkannya surat tersebut merupakan cara ICC melakukan proses penuntutan terhadap pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Presiden Vladimir Putin khususnya dari aspek dugaan deportasi atau pemindahan anak-anak di Ukraina secara ilegal. Berdasarkan pernyataan dari Pemerintah Ukraina dan adanya laporan dari lembaga yang dibentuk oleh HRC memperkuat dugaan tersebut sehingga menjadi dasar yang cukup untuk ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan, selain itu dugaan kejahatan perang berupa deportasi anak secara ilegal memang merupakan bentuk kejahatan perang sebagaimana yang diatur pada pasal 8 Statuta Roma. Alasan Rusia yang menyatakan pemindahan anak-anak tersebut bertujuan untuk mencegah mereka menjadi korban perang

sebenarnya dimungkinkan sebagaimana ketentuan Pasal 49 Konvensi Jenewa keempat, namun pasal tersebut juga menyebutkan bahwa tidak boleh ada pemisahan keluarga, hal tersebut menjadi bentuk pelanggaran yang juga dilakukan karena anak-anak yang diduga dipindahkan juga dipisahkan dengan orangtua mereka. Berbicara mengenai penyelesaian konflik yang terjadi, bahkan ketika Presiden Vladimir Putin diberikan surat perintah penangkapan, hal itu tidak meredam tindakan Rusia. Sehingga, diperlukan adanya komitmen yang serius dari PBB dan anggota PBB untuk meredam dan menghentikan tindakan Rusia lebih jauh dari apa yang sudah terjadi dan meminta pertanggungjawaban dari Pemerintah Ukraina atas pelanggaran yang dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dan hasil analisis yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa saran, yaitu:

1. Saran untuk anggota ICC yang telah meratifikasi Statuta Roma sudah seharusnya berkerjasama dan mendukung penuh upaya ICC dalam menegakkan pelanggaran yang menjadi yurisdiksinya, berbicara mengenai ketidak inginan melaksanakan surat perintah dikarenakan keamanan nasional maka dapat menolak surat perintah penangkapan tersebut dengan menyampaikan alasan kepada ICC dan Penuntut Umum. Selanjutnya, diperlukan adanya perumusan amandemen yang mengatur mengenai aturan tambahan khususnya mengenai pelaksanaan surat perintah penangkapan yang ditujukan kepada seorang kepala negara, hal ini diperlukan untuk memastikan pelaksanaan dari surat perintah penangkapan tersebut dapat terlaksana tanpa hambatan karena alasan ketidakmampuan atau ketidak inginan negara anggota untuk menangkap Kepala Negara dari negara lain.
2. Sebelum ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Vladimir Putin, seharusnya rencana Rusia untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya kepada Dewan Keamanan PBB dapat direalisasikan, karena hal tersebut dapat mewujudkan adanya

kesepakatan antara kedua negara mengenai anak-anak yang telah dipindahkan. Selain itu, Pemerintah Rusia perlu berkomitmen mengenai perlindungan anak-anak di masa perang yang sesuai dengan ketentuan Konvensi Jenewa khususnya Pasal 49 yang mengatur mengenai pemindahan penduduk oleh negara yang menduduki suatu wilayah, yang mana seharusnya Rusia tidak memindahkan anak-anak tersebut dengan memisahkannya dari keluarga asalnya. Selain itu Pemerintah Rusia juga seharusnya tetap menghormati kedaulatan Ukraina dengan tidak melakukan pemindahan anak-anak tersebut tanpa izin, sehingga diperlukan adanya diplomasi antara Rusia dan Ukraina yang juga ditengahi oleh negara netral terkait bagaimana seharusnya anak-anak itu dilindungi agar tidak ada pelanggaran dan sesuai dengan ketentuan HHI yang ada. Selain itu, berbicara mengenai peran negara-negara anggota PBB, diperlukan adanya komitmen dan tindakan yang nyata untuk menekan Pemerintah Rusia, yang mana tindakan tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan cara melakukan embargo ekonomi atau pelarangan terhadap komoditas perdagangan tertentu apabila Pemerintah Rusia tidak segera menghentikan tindakannya di Ukraina. Hal tersebut tentunya akan mempersulit perekonomian Rusia dan dapat menjadi pertimbangan untuk segera menghentikan invasi yang terjadi.

\